

Sebagai Negara Super Power Kebudayaan, Indonesia belum Memiliki Strategi Kebudayaan

[21 Apr 2018 | 12:54 WIB 0 359](#)



Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid, sebagai pembicara kunci FMKN, yang berlangsung di Jakarta, 20-22 April 2018. (Foto: kabare.id/ysh)

Ternyata, Indonesia yang disebut oleh UNESCO sebagai negara super power kebudayaan, belum memiliki Strategi Kebudayaan. Untuk menjawab hal ini, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud kini sedang bekerja keras menjangar pokok-pokok pikiran kebudayaan yang dimulai dari seluruh daerah (kabupaten/kota), provinsi hingga nasional, untuk dijadikan landasan kebijakan strategi kebudayaan.

JAKARTA-KABARE.ID : Dijadwalkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota berlangsung 15 April - 21 Mei 2018. Dilanjutkan penyusunan PPKD tingkat Propinsi 6 Agustus- 5 Oktober 2018. Adapun hasilnya akan dibawa ke tingkat nasional untuk disusun dan ditetapkan sebagai Strategi Kebudayaan dalam forum Kongres Kebudayaan Indonesia pada Oktober 2018 mendatang.

"Ini gawe besar, yang melibatkan para pemangku kepentingan kebudayaan di 516 kabupaten/kota, 34 provinsi, dan tokoh-tokoh nasional," tutur Direktur Jenderal Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid, saat membuka Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN), di Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/4/2018) malam. FMKN yang berlangsung hingga 22 April 2018, diikuti oleh 97 seniman dari 32 provinsi; baik dari unsur organisasi seni, komunitas seni, lembaga kesenian, Dewan Kesenian dan Kabupaten Kota, dll.

Hilmar menyadari, penyusunan PPKD yang berjenjang seperti itu, krusial dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, harapannya, dapat menghasilkan landasan kebijakan yang solid. Sehingga, Kongres Kebudayaan Indonesia 2018 mendatang, tujuannya jelas: untuk menghasilkan perubahan. "Jika pada kongres-kongres kebudayaan sebelumnya hanya pameran makalah, maka Kongres Kebudayaan 2018 merupakan konsolidasi kepandaian dan kekuatan agar kebijakan kebudayaan mempunyai pijakan yang lebih solid. Itu harapannya," ujarnya di depan Direktur Kesenian Restu Gunawan, Tubagus Andre Sukmana, Kasudbit Seni Media, para Pengurus Harian Kongres Kesenian Indonesia (KKI) dan para peserta.

Anggaran Kebudayaan



Sebagian peserta FMKN dari berbagai provinsi foto bersama Tubagus Andre Sukmana, Kasubdit Seni Media Kemdikbud. (Foto: dok Kabare.id/ysh)

Terkait dengan implementasi Undang Undang No.5/2017, tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya mengenai anggaran kebudayaan, Hilmar menjelaskan, bahwa tahun ini telah disusun pola penganggaran kebudayaan di tingkat daerah secara lebih jelas, dan akan berlaku mulai tahun depan. Bahwa daerah mempunyai dua sumber pendanaan kebudayaan. Pertama, UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan menyisihkan anggaran kebudayaan dan menjadikan kebudayaan sebagai urusan wajib non-pelayanan dasar. Artinya, semua daerah wajib ada dinas yang mengurus kebudayaan. "Sehingga tak ada alasan lagi, nantinya daerah bilang tak punya duwit untuk kebudayaan, " tandasnya.

Sumber kedua, daerah akan mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK). Seperti dana BOS di dunia pendidikan, dengan DAK yang dikucurkan dari pusat, untuk bantuan operasional, misalnya Museum, Taman Budaya, dan lain-lain.

"Sekarang ini kita tak punya angka yang kongkrit, berapa besar, untuk memajukan kebudayaan di Tanah Air," keluh Dirjen Kebudayaan.

FMKN

Forum Masyarakat Kesenian Nasional (FMKN) lahir dari Kongres Kesenian Indonesia (KKI) III/2015 di Bandung. FMKN tahun ini yang kedua, setelah yang pertama tahun 2017.

Agenda pokoknya untuk FMKN 2018 antara lain membahas strategi dan persiapan masyarakat kesenian dalam penyusunan PPKD di daerah masing-masing.

Yusuf Susilo Hartono, peserta FMKN